

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MEMBENTUK KARAKTER MASYARAKAT SIAGA BENCANA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

***Abdurrahman, M. Ulfatul Akbar Jafar, Eri Sulastri**
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
Abdurrahman@ummat.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 20-06-2020
Disetujui: 22-07-2020

Kata Kunci:

Penanggulangan
bencana
BPBD
Siaga
Lombok Timur
Karakter masyarakat

ABSTRAK

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota dengan pedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. Penanggungan dan pengungsian dilakukan dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien serta melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Sesuai dengan hal tersebut maka pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah mengenai penanggulangan bencana, demikian halnya dengan pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga telah memiliki BPBD yang telah berdiri kurang lebih delapan tahun ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran BPBD dalam membentuk karakter masyarakat siaga bencana di Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan turun lapangan di Kabupaten Lombok Timur. Teknik Penentuan Informan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian ini adalah Peranana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur Dalam membentuk karakter masyarakat siaga bencana di Kabupaten Lombok Timur melalui 3 prograam, yaitu simulasi, sosialisasi/penyuluhan dan pelatihan. Ketiga program tersebut diadakan empat kali setahun baik diadakan di Kecamatan, Desa, Dusun dan Instansi. Faktor penghambat yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Lombok Timur dalam membentuk karakter masyarakat siaga bencana pada masyarakat Kabupaten Lombok Timur yaitu: a) kurangnya dana, b) kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk belajar memahami bencana, c) kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pemerintah seperti sosialisasi, dan d) kurangnya tenaga professional dalam penanganan bencana dan mitigasi pada masyarakat.

Abstract:

The Regional Disaster Management Agency (BPBD) is a non-departmental government agency that carries out the task of managing disasters in the blood of both Province and District / City with guidance on policies established by the National Coordinating Board for Disaster Management. Handling and evacuation is done by acting quickly, precisely, effectively and efficiently as well as coordinating the implementation of disaster management activities in a planned, integrated and comprehensive manner. In accordance with this, the regional government must issue regional regulations on disaster management, as well as the East Lombok Regency government also has a BPBD that has been established for approximately eight years. The purpose of this study was to determine the role of BPBD in shaping the character of disaster preparedness communities in East Lombok Regency. The research method used was a descriptive qualitative method carried out by going to the field in East Lombok Regency. Determination Techniques Informants in this study are observation, interviews and documentation. The data analysis technique in this study is an interactive analysis model. The results of this study are Regional Disaster Management Agency (BPBD) of East Lombok Regency In forming the character of disaster preparedness communities in East Lombok Regency through 3 programs, namely simulation, socialization / counseling and training. The three programs are held four times a year both in the Districts, Villages, Villages and Agencies. Inhibiting factors faced by the East Lombok Regency BPBD in shaping the character of disaster preparedness community in the East Lombok Regency community are: a) lack of funds, b) lack of awareness of the community to learn to understand disasters, c) lack of community participation in government programs such as socialization, and d) lack of professional staff in disaster management and mitigation in the community.

A. LATAR BELAKANG

Meskipun tersimpan kekayaan alam dan keindahan pulau-pulau yang luar biasa, bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa wilayah nusantara ini memiliki 120 gunung api aktif atau dikenal dengan Ring of Fire dan berada pada pertemuan tiga lempengan tektonik aktif dunia lempengan Indon-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ring of Fire berada di bagian lempengan tektonik menempatkan negara kepulauan ini berpotensi terhadap ancaman bencana alam. Di sisi lain, posisi Indonesia yang berada di wilayah tropis serta kondisi hidrologis memicu terjadinya bencana alam lainnya, seperti angin puting beliung, tanah longsor, gempa bumi, hujan ekstrim, banjir, kebakaran hutan dan lahan.

Menghadapi ancaman bencana tersebut, pemerintah Indonesia berperan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana di tanah air. Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum maupun sesudah terjadinya bencana.

Bencana alam selama ini selalu dipandang sebagai *forcemajore* yaitu suatu hal yang berada di luar kontrol manusia, oleh karena itu untuk meminimalisir terjadinya korban akibat bencana diperlukan kesadaran atau kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikuatkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja BPBD yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait yaitu peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Ada 3 hal dalam penanggulangan bencana alam yang perlu dilakukan yaitu perolehan informasi, pemrosesan informasi dan sosialisasi bencana alam. Pertama, perolehan informasi bertujuan menghimpun segala informasi terkait bencana alam yang diperoleh dari berbagai sumber. Kedua, pemrosesan bertujuan mengolah informasi yang diperoleh untuk digunakan sebagai perencanaan penanggulangan bencana alam. Ketiga, sosialisasi bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang telah diproses dapat diketahui oleh seluruh orang secara luas dan tepat sasaran, terutama masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersinergi dengan masyarakat dalam melakukan kesiapsiagaan bencana pada setiap daerah, khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur sebagai instansi berkaitan langsung dalam penanggulangan bencana berupaya selalu siaga dalam membentuk karakter terhadap potensi bencana yang mungkin saja terjadi yang juga bersifat koordinatif, komando dan pelaksana yang menangani penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Timur untuk mewujudkan masyarakat Lombok Timur yang tangguh, berkarakter, maju dan berkualitas dalam penanggulangan bencana yang mampu menjadi faktor pendorong dan penarik dalam mendukung pembangunan dan pergerakan perekonomian Kabupaten Lombok Timur untuk kedepannya atau di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik dan bermaksud untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang dituang dalam bentuk usulan penelitian yang berjudul "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Membentuk Karakter Masyarakat Siaga Bencana di Kabupaten Lombok Timur".

Menurut Soekanto (2009:212-213) peran adalah proses dinamis kedudukan (*status*). Dalam sebuah organisasi setiap individu memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Tugas-tugas tersebut merupakan batasan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan berdasarkan peraturan-peraturan dari organisasi atau lembaga tersebut, agar segala pekerjaan dapat tertata rapi dan dapat dipertanggung-jawabkan oleh setiap pegawainya

Karakter merupakan rangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan yang melekat dan menjadi ciri individualistik seseorang. Meski bersifat pribadi, karakter dipengaruhi oleh konteks lingkungan, sosial budaya dan berproses secara cair. Artinya berkembang dalam proses yang berlangsung selama seumur hidup yang melibatkan keseluruhan formasi sosial masyarakat, seperti lingkungan keluarga, lingkungan lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial masyarakat (Nur Hamzah M,Pd). Sementara itu, istilah karakter yang dalam Bahasa Inggris, *character* berasal dari istilah Yunani, *character* dari kata *charassein* yang berarti membuat tajam atau membuat dalam. Karakter juga dapat berarti mengukir. Sifat utama ukiran adalah melekat kuat diatas benda yang diukir. Karena itu, Wardani seperti dikutip Endri Agus Nugraha menyatakan bahwa karakter adalah ciri khas seseorang dan karakter tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya karena karakter terbentuk dalam lingkungan sosial budaya tertentu.

Dengan demikian, karakter terbentuk dari tiga macam bagian yang saling berkaitan; pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Karakter yang baik terdiri atas mengetahui kebaikan, menginginkan kebaikan, dan melakukan kebaikan-kebiasaan pikiran, kebiasaan hati, kebiasaan perbuatan.

Ketiganya penting untuk menjalankan hidup yang bermoral; ketiganya adalah faktor pembentuk kematangan moral. Ketika kita berpikir tentang jenis karakter yang kita inginkan bagi anak kita, jelas bahwa kita ingin agar mampu menilai hal yang baik dan buruk, dan sangat peduli pada hal yang benar, dan melakukan apa yang menurut mereka benar-bahkan disaat mereka dihadapkan pada tekanan dari laur dan godaan dari dalam.

Nurjanah dkk (2013:45) mengemukakan bahwa penanggulangan bencana harus didasarkan pada prinsip-prinsip praktis sebagai berikut :

- a) Cepat dan tanggap
Bahwa penanggulangan bencana dilakukan dengan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadilan.
- b) Prioritas
Perioritas dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana yang harus mengutamakan kelompok rentan.
- c) Koordinasi dan Keterpaduan
Koordinasi yang dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana yang didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Sedangkan keterpaduan dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

- d) Berdayaguna dan berhasilguna
Dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.
- e) Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dimaksudkan bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan akuntabilitas adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
- f) Kemitraan
Penanggulangan bencana harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang.
- g) Pemberdayaan
Penanggulangan bencana dilakukan dengan melibatkan korban bencana secara aktif.
- h) Non Deskriminatif
Pananggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhaap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.
- i) Non-Proselitisi
Dalam penanggulangan bencana dilarang menyebarkan agama dan atau keyakinan.

Tahapan penanggulangan bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Tahapan	Tujuan	Manajemen	Penyelenggara	Kegiatan
Pra Bencana	Pengurangan resiko bencana	Manajemen resiko bencana	Situasi tidak terjadi bencana dan situasi tetrdatap potensi bencana	Pencegahan bencana dan Mitigasi bencana (mitigation)
Saat Bencana	Penanganan Darurat	Manajemen Darurat	Situasi tanggap darurat	Tanggap darurat (emergency response),
Tahapan Pasca Bencana	Pemulihan	Manajemen Pemulihan	Situasi tidak terjadi bencana dan situasi tetrdatap potensi bencana	Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pemerintah harus mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk mengontrol situasi daerah rawan bencana. Kemampuan itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekontruksi dan mengatasi masalah populasi. Pemerintah dengan sebuah pengembangan program manajemen bencana dapat melakukan koordinasi yang baik.

Fokus pemerintahan lokal, masalah manajemen bencana difokuskan pada pemerintah lokal, ada beberapa alasan yaitu :

- a) Manajemen bencana di implementasikan oleh pemerintah lokal.
- b) Pemerintah lokal mempunyai peran aktif dalam manajemen bencana.
- c) Pemberian wewenang yang besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
- d) Kebijakan respons bencana memerlukan tempat secara lokal.

Alasan-alasan tersebut mendasari manajemen bencana di wilayah lokal merupakan kunci dalam pelaksanaan manajemen bencana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Hal ini merupakan suatu pilihan untuk mencapai pengertian fakta sosial dalam suatu penelitian melalui pendeskripsian mendalam sehingga akan diperoleh suatu makna gejala sosial yang diamati (1995:81). Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktifitas sosial yang berkenaan dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur.

Pada jenis penelitian kualitatif ini yang menjadi data utama adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain (Moleong, 2005:157). Sedangkan pengumpulan data secara simultan selama masa penelitian sambil menganalisa data tersebut. Dengan demikian, sambil mengumpulkan data dari subjek diperlukan teknik/metode tertentu agar data yang dihasilkan bisa relevan dengan masalah penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Membentuk Karakter Masyarakat Siaga Bencana Kabupaten Lombok Timur

Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Timur merupakan tanggungjawab bersama dengan pemerintah sebagai penanggungjawab utama. Secara garis besar, peran dan fungsi SKPD dan Lembaga Pemerintah di tingkat Kabupaten Lombok Timur serta instansi vertikal yang ada dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengkoordinir, melaksanakan, sekaligus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh upaya penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Barat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mempunyai peran penting dalam memberikan informasi, pengetahuan, dan pelatihan dalam membangun wawasan mengenai penanggulangan bencana kepada masyarakat yang berupaya meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan factor lingkungan. Pada prosesnya, program ini mengoptimalkan manfaat sumber daya alam, sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan, dengan meserasikan ketiga komponen tersebut sehingga dapat berkesinambungan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membutuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap program yang direncanakan, sehingga dapat tercapainya keberhasilan suatu program.

Selain BPBD ada pula yang berperan penting, yaitu keterlibatan dari TNI/POLRI dalam membantu kegiatan kesiapsiagaan, pencarian dan penyelamatan (SAR) dan mendukung pengkoordinasian upaya saat terjadi bencana. Lembaga non pemerintah lain seperti PMI memberikan bantuan medis pada saat kondisi

darurat bencana, serta pelaku usaha memberikan bantuan logistic dan finansial di dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

Dari pernyataan salah satu anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), memberikan keterangan bahwa ketika berada di lokasi pemerintah saling bekerjasama dengan instansi/dinas terkait untuk membantu proses rehabilitasi para korban yang terkena dampak bencana agar mereka langsung diberikan bantuan.

Penulis berpendapat bahwa dalam melaksanakan tugas kemanusiaan memang dibutuhkan kerjasama pemerintah itu sendiri seperti kerjasama antar instansi/dinas terkait agar semua permasalahan yang ada di masyarakat dapat terselesaikan sesuai harapan.

2. Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Membentuk Karakter Masyarakat Siaga Bencana

Dalam membentuk karakter masyarakat siaga bencana, BPBD Kabupaten Lombok Timur mengadakan program kerja empat kali setahun untuk membentuk karakter masyarakat siaga bencana seperti Penyuluhan dan sosialisasi, simulasi, dan pelatihan melalui sekolah/instansi, kecamatan, desa dan dusun.

Melihat kenyataan bahwa keadaan geografis Indonesia yang tidak diantisipasi oleh masyarakat, akibatnya bencana selalu mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah besar, karena selain bencana yang disebabkan oleh fenomena alam, bencana juga dapat disebabkan oleh perilaku manusia, antara lain karena kelalaian, ketidaktahuan, maupun sempitnya pemikiran dari sekelompok masyarakat atau disebut bencana sosial.

Adapun program yang dibentuk untuk menjadikan masyarakat yang berkarakter yang sadar terhadap bencana melalui program maka masyarakat perlu dibekali dalam menanamkan nilai-nilai karakter seperti peduli sosial, peduli lingkungan, cinta damai dan bersahabat agar menjadi tangguh dan siap menghadapi bencana.

3. Wujud Program yang Sudah Dilaksanakan

Begitu banyak program yang telah dibuat oleh BPBD Kabupaten Lombok Timur dalam membentuk karakter masyarakat. Wujud program yang telah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Lombok Timur berupa pelatihan dan penyebarluasan informasi, antara lain :

a. Pelatihan Mitigasi Bencana

Dalam kegiatan tersebut hadir BPBD Kabupaten Lombok Timur, instansi-instansi terkait juga turut berpartisipasi dalam pelatihan tersebut seperti TNI, PMI, Badan Sar Nasional (Basarnas), Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan organisasi Save The Children beserta masyarakat sekitar dan sejumlah murid sekolah.

Tujuan dari kegiatan itu untuk memberikan pemahaman kesiapsiagaan dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Kesiapsiagaan tersebut penting diajarkan di sekolah.

Dalam pelatihan tersebut siswa diberikan materi tentang kebencanaan seperti mencari titik kumpul dan upaya yang dilakukan agar siswa jangan panik dalam menghadapi gempa.

b. Sosialisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur melakukan sosialisasi masyarakat tanggap bencana ke Kelurahan, RT-RW dan sekolah. Upaya itu dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan saat terjadi bencana.

Dalam sosialisasi masyarakat tidak hanya dibekali materi di dalam ruangan namun juga mengikuti simulasi dilapangan seperti tata cara membuat dapur umum, tata cara pertolongan pertama korban bencana dan lainnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur menjadikan masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak bencana, harus diberdayakan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, sehingga mampu melakukan upaya penangan dampak bencana dan pengurangan resiko.

c. Pelatihan

Kepala BPBD Lombok Timur, Bapak Purnama Hadi mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk membekali pengetahuan tentang penanggulangan bencana, meningkatkan pemahaman tentang kebijakan penanggulangan bencana, dan sebagai silaturahmi antarpegiat kebencanaan dengan pemerintah kota/kabupaten.

pelatihan darurat bencana bagi pelajar diharapkan mampu menumbuhkan jiwa gotong royong serta memberikan pemahaman tentang kebencanaan.

4. Proses dalam Pembentukan Karakter

Proses dalam pembentukan karakter masyarakat yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Lombok Timur ialah melakukan simulasi, wawancara serta sosialisasi atau penyuluhan di titik wilayah rawan bencana dan tempat umum.

a. Proses Simulasi

Setelah dibentuknya kepengurusan Forum Pengurangan Resiko Bencana, selanjutnya diadakan simulasi bencana atau gladi lapang. Simulasi bencana merupakan salah satu metode latihan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pelaku sesuai dengan bidang tugasnya, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pengetahuan dan keterampilan di lapangan. Simulasi ini bertujuan untuk menguji kemampuan instansi di daerah ini dalam menghadapi bencana alam yang datang tanpa diduga.

Simulasi bencana dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah simulasi tentang perilaku fisik kejadian bencana dan simulasi saat terjadinya bencana. Sedangkan simulasi yang kedua bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada masyarakat bagaimana sebaiknya bertindak saat terjadinya bencana. Masyarakat diberikan pemahaman dan pengalaman tentang perilaku bencana, jalur-jalur evakuasi, pola piker dan tindakan yang perlu atau tidak perlu dilakukan saat terjadi bencana, memanfaatkan

jalur-jalur evakuasi, memanfaatkan sistem informasi yang telah dibuat sebelumnya, dan yang paling penting adalah memutuskan tindakan yang harus diambil dalam waktu yang singkat itu dengan mental yang baik. Scenario simulasi ini melibatkan seluruh unsur yang terdiri dari TNI, Kepolisian, Badan Search And Rescue I (SAR), Palang Merah Indonsia (PMI), Tagana dan Forum Pengurangan Resiko Bencana.

b. Sosialisasi/Penyuluhan

Proses sosialisasi adalah memberikan arahan atau menginformasikan dan mengajak kepada warga sekitar yang berada pada titik rawaan bencana untuk tidak membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, dan bekerjasama atau gotong-royong dalam mengatasi bencana.

c. Pelatihan

Proses pelatihan ini melakukan praktek langsung kepada masyarakat tentang bagaimana cara menghindari bencana yang sedang terjadi.

5. Hasil Program Pembentukan Karakter

Nama Program	Hasil	
	Keutamaan	Kelemahan
Simulasi	Secara spesifik akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis serta koordinasi atau komando yang lenih baik dalam penanggulangan bencana dan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan memberikan pemahaman tindakan awal saat terjadi bencana dan simulasi ini akan mendorong kesiapsiagaan aparat dan masyarakat dalam menghadapi ancaman bahaya yang bisa terjadi kapan saja.	Tidak mampu memberikan hasil yang maksimal, atau hanya sekedar untuk mengurangi resiko bencana.

Sosialisasi dan penyuluhan	Untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap hal-hal yang menyebabkan terjadinya bencana alam dan meningkatkan nilai-nilai karakter.	Tidak mampu mengundang masyarakat secara keseluruhan.
Pelatihan	Untuk menurunkan tingkat kepanikan dan trauma terhadap bencana dan yang sedang terjadi	

6. Faktor Penghambat BPBD Kabupaten Lombok Timur dalam Membentuk Karakter Masyarakat Siaga Bencana

Dari hasil wawancara ketiga informan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa faktor penghambat dialami BPBD Kabupaten Lombok Timur dalam membentuk karakter masyarakat siaga bencana di Kabupaten Lombok Timur adalah :

- a. Dana dan biaya, karena dana khusus siap pakai untuk penggunaan program kerja;
- b. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk belajar memahami bencana;
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pemerintah, seperti sosialisasi;
- d. Kurangnya tenaga professional dalam penanganan bencana dan mitigasi pada masyarakat.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mempunyai peran penting dalam memberikan informasi, pengetahuan, dan pelatihan dalam membangun wawasan mengenai penanggulangan bencana kepada masyarakat yang berupaya meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan factor lingkungan. Pada prosesnya, program ini mengoptimalkan manfaat sumber daya alam, sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan, dengan meserasikan ketiga komponen tersebut sehigga dapat berkesinambungan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membutuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap program yang direncanakan, sehingga dapat tercapainya keberhasilan suatu program.

Dalam membentuk karakter masyarakat siaga bencana, BPBD Kabupaten Lombok Timur mengadakan program kerja empat kali setahun untuk membentuk karakter masyarakat siaga bencana seperti Penyuluhan dan sosialisasi, simulasi, dan

pelatihan melalui sekolah/instansi, kecamatan, desa dan dusun. Adapun program yang dibentuk untuk menjadikan masyarakat yang berkarakter yang sadar terhadap bencana melalui program maka masyarakat perlu dibekali dalam menanamkan nilai-nilai karakter seperti peduli sosial, peduli lingkungan, cinta damai dan bersahabat agar menjadi tangguh dan siap mengadapi bencana.

Dari hasil wawancara terhadap informan, diperoleh informasi bahwa faktor penghambat dialami BPBD Kabupaten Lombok Timur dalam membentuk karakter masyarakat siaga bencana di Kabupaten Lombok Timur adalah :

- a. Dana dan biaya, karena dana khusus siap pakai untuk penggunaan program kerja;
- b. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk belajar memahami bencana;
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pemerintah, seperti sosialisasi;
- d. Kurangnya tenaga professional dalam penanganan bencana dan mitigasi pada masyarakat.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka saran yang kiranya dapat menjadi bahan masukan bagi BPBD Kabupaten Lombok Timur dan untuk kita semua adalah :

- a. Semua yang terlibat pada program yang telah dilakukan haruslah mempunyai rasa kerjasama yang lebih baik antara pemerintah yang memberikan program dan masyarakat yang menerimanya sehingga menghasilkan tujuan yang baik pula. Harapan-harapan dari pemerintah dan masyarakat sebaiknya menjadi semangat untuk kebaikan kita semua.
- b. Harus membangun kerjasama antara lembaga melalui nota kesepahaman sebagai komitmen untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam menanam nilai-nilai karakter.
- c. Harus adanya pembentukan forum-forum pengurangan resiko bencana
- d. Hambatan yang terjadi menjadi pelajaran untuk ke depannya agar lebih memperhatikan kendala yang ada dengan meminimalisir dana yang ada sehingga semua dapat dijalankan dengan baik.
- e. Seharusnya pemerintah ataupun pihak BPBD tidak hanya melakukan sosialisasi ataupun latihan dan simulasi dalam program kegiatan pembentukan karakter masyarakat siaga bencana Kabupaten Lombok Timur, contohnya seperti pihak BPBD harus memasang spanduk maupun baliho di tempat-tempat umum ataupun tempat keramaian. Melakukan penyiaran di televisi maupun radio agar masyarakat dapat siap siaga dalam menghadapi ataupun menanggulangi bencana.
- f. Dalam setiap program yang dijalankan, BPBD Kabupaten Lombok Timur juga juga harus

melakukan Program-program recovery. Program ini bertujuan membantu para korban bencana agar segera pulih dari traumanya dan menjalani aktifitas kesehariaannya, seperti trauma healing, sekolah darurat, pelayanan orang cacat dan jompo serta ibu hamil, dan lain-lain.

Penanggulangan Bencana pada Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir
 [18]Musyadad, Anwar. 2015. *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak Serang.*

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Barnawi & Arifin, M. 2011. *Strategi & Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- [2] Bugin, Barhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana.
- [3] Hidayatullah, F.M. 2009. *Guru Sejati: Membangun Insan Berkarakter Kuat dan & Cerdas*. Surakarta : Yuma Pustaka.
- [4] Kurniawan, Syamsul. 2013. *Pendidikan Karakter Konsepsi & Implementasinya secara Terapdu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat*. Pontianak : Ar-Ruzz Media.
- [5] Licaksono, Thomas. 2013. *Pendidikan Karakter : Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik*. Bandung : Nusa Media.
- [6] Nurjanah, dkk. 2013. *Manajemen Bencana*. Bandung:Alfabeta
- [7] Sedarmayanti & Hidayat, S. 2011. *Metodelogi Penelitian*. Bandung : Mandar Maju.
- [8] Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.
- [9] Willis, S.S. 3022. *Psikologi Pendidikan*. Bandung : CV. Alfabeta.
- [10]UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- [11]Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 51 tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur.
- [12]Hasani, Furqon. 2015. *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul dalam Mitigasi Bencana Alam pada Masyarakat Kabupaten Banttul*. www.digilib.uin-suka.ac.id. Diakses pada 17/10/2019.
- [13]Latief Abdul. 2015. *Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Lombok Timur*. www.ejournal.unesa.ac.id. Diakases pada 20/10/2019.
- [14]<http://www.bpbd.go.id>. *Tugas dan Fungsi Pokok BPBD*. Diakses pada 17/10/2019.
- [15]Ahdiah, Indah. 2003. *Peran Perempuan dalam Masyarakat*.
- [16]Herman. 2015. *Peran Bandar Udara dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat*. Mataram.
- [17]Islamia, Fela. 2017. *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam Membangun Wawasan*